

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi pembangunan berkaitan dengan strategi untuk pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial, dan perluasan kemungkinan bagi populasi di negara berkembang melalui bantuan pemerintah dan sektor swasta untuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi kerja yang lebih baik. Ekonomi pembangunan juga mempelajari aspek ekonomi pembangunan, termasuk proses pembangunan, di negara-negara tersebut. Seiring dengan pertumbuhan penduduk suatu negara, pendapatan keseluruhan dan pendapatan per kapita meningkat. Hal ini dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Seiring dengan ini, struktur ekonomi negara mengalami perubahan mendasar, dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tercapai.

Todaro (2006:22) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi memiliki banyak sisi, meliputi upaya untuk melakukan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi, guna untuk mengatasi timpangnya pendapatan, dan memberantas kemiskinan, serta sejumlah perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional.

Faktor-faktor pembangunan ekonomi meliputi kemiskinan. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja, memperluas akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan infrastruktur merupakan bagian dari tujuan

pembangunan ekonomi yang lebih besar untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Semua hal ini bekerja bersama-sama untuk membuat ekonomi lebih ramah bagi semua jenis orang dan lebih mungkin untuk berkembang secara berkelanjutan.

Di mana pun mereka berada di dunia, pemerintah tampaknya selalu memperhatikan kemiskinan. Khususnya di negara-negara berkembang, kemiskinan bahkan telah berkembang menjadi fenomena ekonomi yang berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas pemerintah pada suatu saat. Sebagai negara berkembang, Indonesia memahami beratnya masalah kemiskinan dan berkomitmen untuk mengatasinya setiap tahun sebagai bagian dari agenda nasionalnya.

Di Indonesia, kemiskinan selalu menjadi masalah. Berdasarkan data BPS (2023), pada Maret 2023, proporsi penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,29%, lebih rendah dibandingkan dengan September 2022 yang mencapai 7,53%. Hal yang terjadi ini memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia yang semula tergolong tinggi, mulai menurun. Sementara itu, proporsi penduduk miskin di pedesaan turun dari 12,36% pada September 2022 menjadi 12,22% pada Maret 2023.

Bhinadi (2017:9) menyatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai ketiadaan kepemilikan dan pendapatan yang rendah, atau lebih spesifiknya, sebagai keadaan di mana kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, papan, dan sandang, tidak terpenuhi.

Rustanto (2015:2) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu, kelompok, atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini termasuk faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, yang menyebabkan pengangguran, dan fakta bahwa banyak penduduk kesulitan mengakses program dan layanan pemerintah.

Di tingkat nasional, kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh setiap pemerintahan. Sebagai akibat dari serangkaian masalah, kemiskinan mencakup beberapa aspek mendasar. Kemiskinan merupakan akibat langsung dari kurangnya tanggung jawab dan transparansi yang ditunjukkan oleh lembaga pemerintah, menurut Bank Dunia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan, yang memiliki beberapa dimensi dan merupakan cerminan dari akuntabilitas dan tanggung jawab lembaga pemerintah.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi yang terus tinggi menonjol di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Menurut statistik, Provinsi Jambi akan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi kelima belas di Indonesia pada tahun 2023, dengan 280,68 ribu orang, atau 7,32% dari populasi yang hidup dalam kemiskinan (BPS Provinsi Jambi, 2023).

Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Provinsi Jambi dari tahun 2000 hingga 2023 ditampilkan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi Tahun 2000-2023 (%)

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Penduduk Miskin (%)
2000	2.407,16	504,90	20,97
2001	2.439,62	325,90	13,35
2002	2.479,46	326,90	13,18
2003	2.565,47	327,30	12,75
2004	2.619,55	325,10	12,41
2005	2.657,45	317,80	11,95
2006	2.683,09	304,60	11,35
2007	2.742,19	281,90	10,28
2008	2.788,21	261,20	9,36
2009	2.833,74	245,00	8,64
2010	3.107,60	260,40	8,37
2011	3.167,60	251,80	7,94
2012	3.227,10	268,50	8,32
2013	3.286,10	277,70	8,45
2014	3.344,40	281,75	8,42
2015	3.402,10	300,71	8,83
2016	3.458,90	289,81	8,37
2017	3.515,00	286,55	8,15
2018	3.570,30	281,69	7,88
2019	3.624,60	274,32	7,56
2020	3.677,90	277,80	7,55
2021	3.730,10	293,86	7,87
2022	3.781,20	279,37	7,38
2023	3.831,00	280,68	7,32
Rata-rata	3.122,49	296,89	9,86

Sumber : (BPS Provinsi Jambi, 2023)

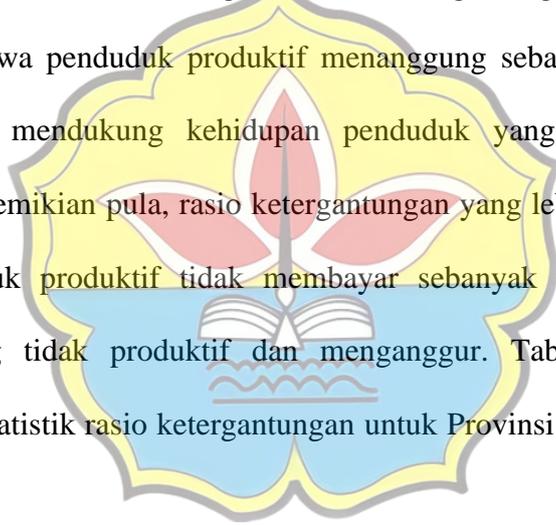
Tabel 1.1 data BPS Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2023, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (kemiskinan absolut) di Provinsi Jambi mengalami perubahan setiap tahunnya. Jika dilihat dari angka kemiskinan di Provinsi Jambi, angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar 20,97% dan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 7,32%.

Rasio ketergantungan penduduk atau yang sering disebut dengan dependency ratio merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi

kemiskinan (Rapanna, 2017:142). Menurut BPS Provinsi Jambi (2023), rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk muda (usia 0–14 tahun), penduduk lanjut usia (usia 65 tahun ke atas), dan penduduk dewasa (usia 15–64 tahun).

Musliadi (2017:60) menyatakan bahwa besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap kelompok usia nonproduktif dapat dinyatakan dalam bentuk rasio ketergantungan atau dependency rate.

Rahman (2023:79) berpendapat bahwa rasio ketergantungan merupakan indikasi penting kesehatan demografi. Rasio ketergantungan yang lebih besar % nya berarti bahwa penduduk produktif menanggung sebagian besar biaya yang terkait dengan mendukung kehidupan penduduk yang tidak produktif dan menganggur. Demikian pula, rasio ketergantungan yang lebih kecil % nya berarti bahwa penduduk produktif tidak membayar sebanyak itu untuk mendukung penduduk yang tidak produktif dan menganggur. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan statistik rasio ketergantungan untuk Provinsi Jambi dari tahun 2000 hingga 2023.



Tabel 1.2
Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan) Di Provinsi Jambi
Tahun 2000-2023 (%)

Tahun	Non Produktif (Ribuan Jiwa)			Produktif (Jiwa)	Rasio Angka Ketergantungan (%)
	0-14 (L+P)	65+ (L+P)	Jumlah	15-64 (L+P)	
2000	794	67,1	861,1	1.546,01	55,69
2001	795,3	72,2	867,5	1.572,07	55,18
2002	798,2	75,1	873,3	1.606,13	54,37
2003	800,4	88,4	888,8	1.676,67	53,00
2004	812	79,4	891,4	1.728,47	51,57
2005	821	83,2	904,2	1.753,25	51,57
2006	791,1	92,6	883,7	1.799,28	49,11
2007	835,3	91,8	927,1	1.815,00	51,07
2008	836,1	95,3	931,4	1.856,81	50,16
2009	837,2	97,3	934,5	1.899,54	49,19
2010	937,4	108,5	1.045,9	2.061,70	50,72
2011	943	112,4	1.055,4	2.112,20	49,96
2012	948,1	116,6	1.064,7	2.162,40	49,23
2013	952,6	121,2	1.073,8	2.212,30	48,53
2014	956,6	126,4	1.083	2.261,40	47,89
2015	959,6	132,4	1.092	2.310,10	47,27
2016	961,6	138,9	1.100,5	2.358,40	46,66
2017	962,2	146,3	1.108,5	2.406,50	46,06
2018	962,9	154,4	1.117,3	2.453,00	45,54
2019	962,5	163,6	1.126,1	2.498,50	45,07
2020	960,7	173,8	1.134,5	2.543,40	44,6
2021	958,4	184,5	1.142,9	2.587,20	44,17
2022	955,5	196,4	1.151,9	2.629,30	43,81
2023	953,1	209	1.162,1	2.668,90	43,54
Rata-rata	895,61	121,95	1.017,56	2.104,94	48,91

Sumber : (BPS Provinsi Jambi, 2023)

Hasil rasio ketergantungan Provinsi Jambi pada periode 2000–2023, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2, bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2000, rasio ketergantungan Provinsi Jambi mencapai puncaknya sebesar 55,69 persen, dan pada tahun 2023 turun menjadi 43,54%. Salah satu cara untuk melihatnya adalah bahwa pada tahun 2000, untuk setiap 100 orang dalam kelompok usia kerja, terdapat 55 orang dalam kelompok usia di bawah 14 tahun dan di atas 65

tahun yang tidak berkontribusi terhadap perekonomian. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023, rasio penduduk nonproduktif terhadap penduduk produktif pada rentang usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas adalah 43/100. Ketika pendapatan penduduk usia kerja digunakan untuk menutupi biaya hidup lansia dan penyandang disabilitas, daya beli tabungan dan investasi akan menurun, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi karena rasio ketergantungan penduduk meningkat.

Inflasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan. Ketika permintaan konsumen melebihi pasokan, maka akan terjadi fenomena yang disebut inflasi, yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh. Sederhananya, inflasi terjadi karena kelebihan modal yang mencari pasokan produk yang tidak mencukupi. Meskipun harga yang berbeda dapat digunakan untuk mengukur inflasi, harga konsumen adalah yang paling umum dan sering dilaporkan sebagai persentase perubahan angka indeks. Huda (2018:175) mengklaim demikian.

Ada yang berpendapat bahwa inflasi merupakan kontributor utama terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Sebagai aturan umum, ketika inflasi tinggi, individu akan mengalami kesulitan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Orang akan jauh dari kata kaya jika hal ini terjadi. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa kenaikan harga yang terus-menerus adalah akar penyebab inflasi. Hasyim menyatakan hal ini pada tahun 2017 di halaman 185.

Tabel 1.3 di bawah ini menunjukkan statistik inflasi untuk Provinsi Jambi dari tahun 2000 hingga 2023.

Tabel 1.3
Inflasi Di Provinsi Jambi Tahun 2000-2023 (%)

Tahun	Inflasi (%)
2000	8,40
2001	10,11
2002	12,62
2003	3,79
2004	7,16
2005	16,50
2006	10,66
2007	7,42
2008	11,57
2009	2,49
2010	10,52
2011	2,76
2012	4,22
2013	8,74
2014	8,72
2015	1,37
2016	4,54
2017	2,68
2018	3,02
2019	1,27
2020	3,09
2021	1,67
2022	6,39
2023	3,27
Rata-rata	6,37

Sumber : (BPS Provinsi Jambi, 2023)

Tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Jambi bervariasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2023, yaitu yang disajikan pada tabel 1.3. Inflasi atau kenaikan inflasi di Provinsi Jambi mencapai rekor terendah sebesar 1,27 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, biaya pangan tetap terkendali, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat inflasi. Dengan puncaknya sebesar 16,50% pada tahun 2005, Provinsi Jambi mengalami tingkat inflasi tertinggi. Peningkatan indeks harga kelompok pengeluaran (BPS Provinsi Jambi, 2023) menunjukkan bahwa harga telah naik, yang mengarah pada tingkat inflasi yang tinggi.

Pengangguran merupakan komponen lain yang memengaruhi kemiskinan. Ketika jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada pertumbuhan angkatan kerja, hasilnya adalah pengangguran terbuka. Karena itu, apabila makin banyak individu yang tidak mendapatkan pekerjaan. Individu tersebut tidak akan dapat bekerja dalam waktu yang lama karena masalah ini. Dengan demikian, mereka benar-benar menganggur karena mereka menganggur penuh waktu. Penurunan pertumbuhan industri atau terhentinya kegiatan ekonomi akibat kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan tenaga kerja merupakan alasan lain yang dapat menyebabkan pengangguran. Per Sukirno (2016:330).

Problema mengenai pengangguran ini bukanlah hal baru. Masalah ini hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jambi. Jambi, dengan tingkat penganggurannya yang tinggi, merupakan salah satu provinsi yang mengalami masalah sosial ekonomi. Angka pengangguran dapat dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan atau kegagalan pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasannya adalah angka pengangguran merupakan barometer kesehatan ekonomi suatu kota. Karena berpotensi memengaruhi beberapa masalah yang saling terkait, pengangguran terbuka di Jambi menjadi topik yang rumit. Pengangguran terjadi ketika orang tidak dapat memperoleh pekerjaan atau ketika tawaran pekerjaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Angka pengangguran terbuka mengukur proporsi angkatan kerja yang saat ini tidak memiliki pekerjaan.

Dari tahun 2000 hingga 2023, berikut ini adalah informasi tentang angka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi Tahun 2000-2023 (%)

Tahun	Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2000	38.400	1.034.244	3,71
2001	60.240	1.073.906	5,60
2002	67.092	1.161.423	5,77
2003	76.659	1.178.492	6,50
2004	73.108	1.210.568	6,03
2005	133.964	1.247.114	10,74
2006	78.264	1.181.650	6,62
2007	76.090	1.222.951	6,22
2008	66.371	1.290.854	5,14
2009	73.904	1.334.496	5,53
2010	83.278	1.545.683	5,38
2011	60.169	1.495.167	4,02
2012	47.296	1.470.920	3,21
2013	70.361	1.452.832	4,84
2014	79.784	1.570.822	5,07
2015	70.349	1.620.752	4,34
2016	67.671	1.692.193	3,99
2017	66.816	1.724.633	3,87
2018	69.075	1.790.437	3,85
2019	73.965	1.765.747	4,18
2020	93.990	1.832.993	5,12
2021	93.754	1.840.594	5,09
2022	86.459	1.884.278	4,58
2023	85.576	1.887.840	4,53
Rata-rata	74.693	1.479.608	5,16

Sumber : (BPS Provinsi Jambi, 2023)

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi antara tahun 2000 dan 2023, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4. Tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah yaitu berada di Provinsi Jambi pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,21%. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), di Provinsi Jambi, sebanyak 783,5 ribu orang bekerja di sektor pertanian (55,04%), 229,9 ribu orang bekerja di sektor usaha (16,15%), dan 202,7 ribu orang bekerja di sektor jasa publik (14,24%). Provinsi Jambi pada tahun 2005 menjadi titik tertinggi pengangguran terbuka yaitu dengan persentase sebesar 10,74%.

Ada berbagai konteks historis yang terwakili dalam sembilan kabupaten dan dua kota yang membentuk Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Distribusi kualitas

lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya bervariasi dari satu Kabupaten atau Kota ke Kabupaten atau Kota lainnya.

Di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan timah. Provinsi ini juga merupakan penghasil utama hasil hutan, seperti perkebunan karet dan kelapa sawit. Provinsi Jambi berjuang melawan kemiskinan karena merupakan provinsi yang sedang berkembang.

Dari latar belakang di atas, penulis melihat ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dependency Ratio, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2000-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian, diperoleh Identifikasi masalah tertulis yaitu berikut ini:

1. Kemiskinan di Provinsi Jambi berfluktuasi dari tahun 2000-2023 dengan rata-rata 9,86 %. **Persentase penduduk miskin** di Provinsi Jambi terendah sebesar 7,32 % pada tahun 2023 sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 20,97% pada tahun 2000.
2. Dependency ratio di Provinsi Jambi berfluktuasi dari tahun 2000-2023 dengan rata-rata 48,91%. Dependency ratio di Provinsi Jambi tertinggi sebesar 55,69 % pada tahun 2000 sedangkan dependency ratio terendah sebesar 43,54 % pada tahun 2023.

3. Rata-rata inflasi Provinsi Jambi tahun 2000 sampai dengan tahun 2023 sebesar 6,37 persen. Sedangkan inflasi terendah Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 1,27% dan inflasi tertinggi pada tahun 2005 sebesar 16,50%.
4. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi berkisar antara 5,01% pada tahun 2000 sampai dengan 5,16% pada tahun 2023. Pada tahun 2005, Provinsi Jambi merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di provinsi tersebut yaitu sebesar 10,74%. Pada tahun 2012, angka pengangguran terbuka turun menjadi 3,21%.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dependency ratio, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2023?
2. Bagaimana pengaruh dependency ratio, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dependency ratio, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dependency ratio, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Bagi akademisi akan memperoleh manfaat dari penelitian ini karena akan menjelaskan variabel-variabel yang memengaruhi dan membedakan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dan menyediakan sumber daya untuk penelitian-penelitian mendatang yang berfokus pada isu ini.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini akan menambah kekayaan informasi masyarakat dalam bidang ekonomi pembangunan dan cabang-cabang ekonomi lainnya. Salah satu cara konkret di mana penelitian dapat membantu mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan bukti empiris tentang unsur-unsur yang berkontribusi terhadap naik atau turunnya angka kemiskinan.

b. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini akan membantu menjelaskan unsur-unsur yang memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga anda dapat menentukan area-area yang memerlukan perhatian segera untuk mengurangi krisis saat ini.